



**RENCANA KERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG**



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas perencanaan pembangunan di daerah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Bali, perlu adanya sinergitas perencanaan program kerja tahunan melalui rencana kerja perangkat daerah;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam penentuan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamatkan bahwa rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SEMESTA BERENCANA TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
8. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
9. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada rencana strategis Perangkat Daerah Semesta Berencana dan RKPD Semesta Berencana.

- (3) Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman dalam:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode tahun 2026; dan
 - b. penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah tahun 2026.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- j. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- m. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- o. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
- p. Dinas Kebudayaan;
- q. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Dinas Perhubungan;
- t. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- u. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- x. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- y. Dinas Ketenagakerjaan;
- z. Dinas Pertanian;
- aa. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- bb. Kecamatan Nusa Penida;
- cc. Kecamatan Dawan;
- dd. Kecamatan Banjarangkan; dan
- ee. Kecamatan Klungkung.

- (2) Renja Sekretariat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Renja Inspektorat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Semesta Berencana Tahun 2026 dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Renja Dinas Kesehatan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (14) Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (16) Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (17) Renja Dinas Kebudayaan Semesta Berencana Tahun 2026 untuk Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Renja Dinas Perhubungan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (21) Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (22) Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (23) Renja Dinas Pariwisata Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (24) Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (25) Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (26) Renja Dinas Ketenagakerjaan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (27) Renja Dinas Pertanian Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (28) Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (29) Renja Kecamatan Nusa Penida Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (30) Renja Kecamatan Dawan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (31) Renja Kecamatan Banjarangkan Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (32) Renja Kecamatan Klungkung Semesta Berencana Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI KLUNGKUNG,

I MADE SATRIA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 4 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ANAK AGUNG GEDE LESMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2025 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH SEMESTA BERENCANA
TAHUN 2026

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung
Tahun 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dalam periode Tahun 2026. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat;

- a. Rencana Kerja merupakan dokumen yang secara substansial penerjemalah dari visi, misi, dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- b. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
- c. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis telah tercapai.

Mengingat arti strategis dokumen rencana kerja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahap penyusunan hingga penetapan dokumen rencana kerja harus mengikuti tatacara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Klungkung ini disusun untuk dapat mewujudkan tujuan dan melaksanakan sasaran dan kebijakan strategis yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 361);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
21. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 35);
22. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dengan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kabupaten Klungkung. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 ini diantaranya adalah :

- a. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar program antar bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar kegiatan di masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.
- d. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum dan hubungan dengan dokumen perencanaan lain serta sistematika laporan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi serta review terhadap rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan, program dan kegiatan menguraikan mengenai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

BAB V PENUTUP

Menguraikan kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Tahun 2026.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung sebagai Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan SKPD dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor Internal yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

1. Jumlah dan kapasitas SDM belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman aparat pemerintah terhadap Tugas dan Fungsi mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat pemerintah yang belum berorientasi pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
5. Adanya aplikasi pengolahan data yang memadai untuk penemuan kembali surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah.
6. Terbatasnya ruang penyimpanan arsip

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

1. Adanya penafsiran yang berbeda terhadap otonomi daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih banyak terjadi konflik norma dan ego sektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak pada Pemerintah Daerah.
3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
4. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sering berubah dan berubah dalam jangka waktu yang pendek dan tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi yang berbeda-beda.

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan kinerja program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Tujuh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. Evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung ditampilkan pada Tabel 2.1.

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Sekretariat Kabupaten Klungkung

TABEL EVALUASI RENJA PERUBAHAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan(Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s./d. Renja SKPD Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja & Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja & Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2024 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket.
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4	1				SEKRETARIAT DAERAH																			
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Perangkat Daerah Dengan Budaya Kerja Optimum					5	40.822.438.040,00	10	34.060.758.841,00	10	34.060.758.841,00	200	83,44	10	34.060.758.841,00			Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	RENJA
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah					90	23.289.490,00	90	19.326.975,00	90	19.326.975,00	100	82,99	90	19.326.975,00			Kepala Bagian Umum	RENJA
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					8	14.443.950,00	8	11.758.400,00	8	11.758.400,00	100	81,41	8	11.758.400,00			Analisis Perencana Ahli Muda	RENJA

4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					31	8.845.540,00	31	7.568.575,00	31	7.568.575,00	100	85,56	31	7.568.575,00			Analisis Perencana Ahli Muda	RENJA
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu					90	19.693.881.906,00	90	19.406.305.328,00	90	19.406.305.328,00	100	98,54	90	19.406.305.328,00			Kepala Bagian Umum	RENJA
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					138	19.660.990.706,00	138	19.377.747.453,00	138	19.377.747.453,00	100	98,56	138	19.377.747.453,00			Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Negara	RENJA
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					14	32.891.200,00	14	28.557.875,00	14	28.557.875,00	100	86,83	14	28.557.875,00			Analisis Perencana Ahli Muda	RENJA
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					100	586.046.812,00	100	441.092.405,00	100	441.092.405,00	100	75,27	100	441.092.405,00			Kepala Bagian Umum	RENJA
4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					60	586.046.812,00	60	441.092.405,00	60	441.092.405,00	100	75,27	60	441.092.405,00			Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Negara	RENJA
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					100	9.555.301.912,00	100	7.513.761.442,00	100	7.513.761.442,00	100	78,63	100	7.513.761.442,00			Kepala Bagian Umum	RENJA
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					12	6.009.181.623,00	12	4.836.410.936,00	12	4.836.410.936,00	100	80,48	12	4.836.410.936,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					1	20.400.000,00	1	0	1	0	100	0	1	0			Analisis Kebijakan Muda	RENJA

4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					12	981.492.500,00	12	712.669.000,00	12	712.669.000,00	100	72,61	12	712.669.000,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24	2.524.562.839,00	24	1.946.755.561,00	24	1.946.755.561,00	100	77,11	24	1.946.755.561,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					2	19.664.950,00	2	17.925.945,00	2	17.925.945,00	100	91,16	2	17.925.945,00			Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Negara	RENJA
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dari Pengadaan Baru					100	1.678.635.820,00	100	599.786.372,00	100	599.786.372,00	100	35,73	100	599.786.372,00			Kepala Bagian Umum	RENJA
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					3	1.678.635.820,00	3	599.786.372,00	3	599.786.372,00	100	35,73	3	599.786.372,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas dan Jabatan					100	862.706.860,00	100	425.614.080,00	100	425.614.080,00	100	49,33	100	425.614.080,00			Kepala Bagian Umum	RENJA
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					5	862.706.860,00	5	425.614.080,00	5	425.614.080,00	100	49,33	5	425.614.080,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan KDH/WKDH					100	1.869.242.328,00	100	924.085.025,00	100	924.085.025,00	100	49,44	100	924.085.025,00			Kepala Bagian Umum	RENJA

4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					1	1.417.792.328,00	1	481.040.025,00	1	481.040.025,00	100	33,93	1	481.040.025,00			Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung	RENJA
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan					16	15.450.000,00	16	15.450.000,00	16	15.450.000,00	100	100	16	15.450.000,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					1	16.000.000,00	1	7.595.000,00	1	7.595.000,00	100	47,47	1	7.595.000,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					1	420.000.000,00	1	420.000.000,00	1	420.000.000,00	100	100	1	420.000.000,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					100	479.999.400,00	100	468.625.300,00	100	468.625.300,00	100	97,63	100	468.625.300,00			Kepala Bagian Umum	RENJA
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan					12	479.999.400,00	12	468.625.300,00	12	468.625.300,00	100	97,63	12	468.625.300,00			Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan						0	0	0	0	0							Analisis Kebijakan Muda	RENJA
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Rencana Aksi RB terealisasi					90	374.186.980,00	86,94	300.886.267,00	86,94	300.886.267,00	96,6	80,41	86,94	300.886.267,00			Kepala Bagian Organisasi	RENJA
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi					2	374.186.980,00	2	300.886.267,00	2	300.886.267,00	100	80,41	2	300.886.267,00			Kepala Bagian Organisasi	RENJA

4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah					100	5.699.146.532,00	100	3.961.275.647,00	100	3.961.275.647,00	100	69,51	100	3.961.275.647,00			Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	RENJA
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan					12	1.165.009.304,00	12	311.328.665,00	12	311.328.665,00	100	26,72	12	311.328.665,00			Kepala Sub Bagian Protokol	RENJA
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan					12	4.424.931.828,00	12	3.596.629.982,00	12	3.596.629.982,00	100	81,28	12	3.596.629.982,00			Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung	RENJA
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan					12	109.205.400,00	12	53.317.000,00	12	53.317.000,00	100	48,82	12	53.317.000,00			Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	99,66	71,75						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	S						
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Capaian IKU Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					100	2.635.366.624,00	124,8	1.994.080.163,00	124,8	1.994.080.163,00	124,8	75,67	124,8	1.994.080.163,00			Kepala Bagian Hukum	RENJA
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Cakupan Terpenuhinya Kebijakan Bidang Pemerintahan					100	252.792.160,00	100	135.331.934,00	100	135.331.934,00	100	53,53	100	135.331.934,00			Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Klungkung	RENJA
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan					2	226.082.660,00	2	118.125.624,00	2	118.125.624,00	100	52,25	2	118.125.624,00			Analisis Kebijakan Ahli Muda	RENJA

4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahn					1	5.846.100,00	1	465.000,00	1	465.000,00	100	7,95	1	465.000,00			Analisis Kebijakan Ahli Muda	RENJA
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah					2	20.863.400,00	2	16.741.310,00	2	16.741.310,00	100	80,24	2	16.741.310,00			Analisis Kebijakan Ahli Muda	RENJA
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Terpenuhi nya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					100	1.357.645.040,00	100	1.108.430.206,00	100	1.108.430.206,00	100	81,64	100	1.108.430.206,00			Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Klungkung	RENJA
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual					1	1.332.003.576,00	1	1.107.680.256,00	1	1.107.680.256,00	100	83,16	1	1.107.680.256,00			Analisis Kebijakan Ahli Muda	RENJA
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB					1	22.316.544,00	1	0	1	0	100	0	1	0			Analisis Kebijakan Ahli Muda	RENJA

4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas					1	3.324.920,00	1	749.950,00	1	749.950,00	100	22,56	1	749.950,00			Analisis Kebijakan Ahli Muda	RENJA
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan tepat waktu					250	937.942.034,00	312	689.524.033,00	312	689.524.033,00	112,4	73,51	312	689.524.033,00			Kepala Bagian Hukum	RENJA
						Persentase Capaian RAD HAM dilaporkan					100		100		100			100						RENJA
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan tepat waktu					250	365.465.488,00	312	305.862.737,00	312	305.862.737,00	124,8	83,69	312	305.862.737,00			Kepala Bagian Hukum	RENJA
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase RAD HAM dilaporkan					100	466.803.942,00	100	318.773.112,00	100	318.773.112,00	100	68,29	100	318.773.112,00			Kepala Bagian Hukum	RENJA
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasikan					250	105.672.604,00	250	64.888.184,00	250	64.888.184,00	100	61,4	250	64.888.184,00			Kepala Bagian Hukum	RENJA
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Presentase Terpenuhiya Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama Daerah					12	86.987.390,00	12	60.793.990,00	12	60.793.990,00	100	69,89	12	60.793.990,00			Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Klungkung	RENJA
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					12	86.460.680,00	12	60.624.040,00	12	60.624.040,00	100	70,12	12	60.624.040,00			Analisis Kebijakan Ahli Muda	RENJA

4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri					1	321.120,00	1	0	1	0	100	0	1	0			Analisis Kebijakan Ahli Muda	RENJA
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					1	205.590,00	1	169.950,00	1	169.950,00	100	82,66	1	169.950,00			Analisis Kebijakan Ahli Muda	RENJA
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Kegiatan (%)																	103,1	69,65						
Predikat Kinerja Dari Seluruh Kegiatan																	ST	S						
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Cakupan IKU bidang Pembangunan dan Perekonomian					100	1.241.399.841,00	100	723.700.192,00	100	723.700.192,00	150	58,3	100	723.700.192,00			Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan SDA	RENJA
						Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Klungkung					80		0		0					0				RENJA
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terpenuhinya Layanan bidang Pembangunan dan Perekonomian (persen)					100	284.815.124,00	100	158.988.340,00	100	158.988.340,00	100	55,82	100	158.988.340,00			Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan SDA	RENJA
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan BUMD dan BLUD					6	109.773.800,00	6	58.384.500,00	6	58.384.500,00	100	53,19	6	58.384.500,00			Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan SDA	RENJA
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan hasil Pengawasan dan Pengendalian ketersediaan pangan					4	125.144.884,00	4	89.338.840,00	4	89.338.840,00	100	71,39	4	89.338.840,00			Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan SDA	RENJA
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Laporan Penyaluran kredit usaha rakyat					4	49.896.440,00	4	11.265.000,00	4	11.265.000,00	100	22,58	4	11.265.000,00			Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan SDA	RENJA

4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai rencana					90	227.892.420,00	90	130.594.611,00	90	130.594.611,00	100	57,31	90	130.594.611,00			Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA	RENJA
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program					2	12.003.800,00	2	7.669.000,00	2	7.669.000,00	100	63,89	2	7.669.000,00			Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA	RENJA
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan					12	68.406.300,00	12	5.853.071,00	12	5.853.071,00	100	8,56	12	5.853.071,00			Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA	RENJA
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaksanaan Pembangunan daerah					12	147.482.320,00	12	117.072.540,00	12	117.072.540,00	100	79,38	12	117.072.540,00			Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA	RENJA
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Level Kematangan UKPBJ					3	491.501.313,00	3	352.240.196,00	3	352.240.196,00	100	71,67	3	352.240.196,00			Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	RENJA
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					12	283.171.264,00	12	227.170.751,00	12	227.170.751,00	100	80,22	12	227.170.751,00			Koordinator Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	RENJA
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik					12	41.344.845,00	12	25.591.385,00	12	25.591.385,00	100	61,9	12	25.591.385,00			Koordinator Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	RENJA

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporn kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran tahun sebelumnya. Beberapa perubahan terhadap struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung terjadi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mulai melaksanakan berlaku pada tahun 2017. Beberapa perubahan terhadap penyusunan program dan kegiatan pun terus dilakukan seiring dilakukannya revisi terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah, sehingga pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Sebelumnya terdapat program dan kegiatan yang tidak dapat dibandingkan capaian tahun sebelumnya dengan perkiraan tahun perencanaan maupun tahun berjalan. Gambaran mengenai evaluasi capaian rencana strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KAB. KLUNGKUNG

NO	Sasaran	Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
		Sasaran	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	2	3	4	5	4	5	8	9
1	terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	indeks reformasi Birokrasi kabupaten Klungkung	81	89,5	88,41	0	109,15	0

Sumber : Bagian Organisasi

Capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung tidak dapat diwujudkan tanpa dukungan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh tujuh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Klungkung pada tahun 2024 mendapat nilai B dengan point 71,71. Hal tersebut memacu Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk lebih meningkatkan lagi akuntabilitas kinerjanya di tahun 2025 dan tahun – tahun mendatang
2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Klungkung pada tahun 2024 mendapat nilai A dengan point 88,41. Sekretariat Daerah sebagai leading sektor dan seluruh Pemerintah Kabupaten Klungkung diharapkan untuk lebih meningkatkan lagi implementasi Reformasi birokrasi di tahun 2025 dan tahun – tahun mendatang.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

1. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1. Belum optimalnya pengendalian pembangunan daerah bidang pemerintahan
2. Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum optimal.
3. Belum optimalnya evaluasi pembangunan daerah bidang pemerintahan.
4. Belum maksimalnya koordinasi terkait kegiatan dibidang Sosial dan Budaya.
5. Belum optimalnya kegiatan kebijakan bidang mental dan spiritual.

2. Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian SDA

1. Pengendalian Pembangunan Daerah belum optimal
2. Pemahaman OPD dan instansi terkait masih lemah tentang inflasi daerah dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Lemahnya data/informasi yang dimiliki oleh OPD teknis sehingga pelaporan tidak bisa maksimal.
4. Pengurangan anggaran juga sangat berpengaruh untuk realisasi kegiatan – kegiatan penunjang program Pembangunan Daerah.

3. Bagian Umum

1. Dalam pelaksanaan langkah - langkah proaktif guna mencapai visi dan misi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Klungkung terdapat beberapa kendala yang harus diberikan perhatian guna peningkatan kinerja pada tahun – tahun selanjutnya. Kendala pertama bersumber pada kualitas sumber daya manusia yang dituntut untuk menguasai keahlian pada bidang yang menjadi tanggung jawab masing – masing personil. SDM di bagian perencanaan untuk mendapat perhatian

khusus karna berkaitan erat dengan Aplikasi sehingga diperlukan SDM yang memadai

2. Penguasaan teknologi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Sistem teknologi merupakan katalisator sistem kerja yang dapat membantu dari beberapa aspek antara lain penghematan waktu, biaya, tenaga, dan terjaminnya akurasi data guna menyajikan laporan yang akuntabel. Keterbatasan ruang untuk penyimpanan dan pengelolaan arsip dan informasi juga menjadikan kendala membutuhkan solusi pemecahan.
3. Belum tercapainya pelayanan yang maksimal terhadap pemenuhan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Klungkung Nomer 70 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebabkan sebagian kegiatan yang sebelumnya menjadi tanggungjawab Bagian lain saat ini telah dilimpahkan ke Bagian Umum tanpa diikuti oleh pelimpahan/pemindahan peronil/SDM yang memadai sehingga menyebabkan beberapa pelayanan menjadi kurang optimal..

4. Bagian Organisasi

1. Tuntutan terhadap kebutuhan akan perencanaan kinerja yang berkualitas belum sepenuhnya dapat terpenuhi, hal tersebut disebabkan karena rendahnya pemahaman terhadap standar-standar kinerja yang seharusnya dicapai dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
2. Kelemahan pengelolaan data kinerja yang bersumber dari kurangnya pemahaman akan indikator kinerja, pemahaman pentingnya data kinerja beserta data dukung dan belum berubahnya *mind set* bekerja untuk mencapai kinerja dan bukan rutinitas semata.
3. Penerapan aplikasi yang terintegrasi antara perencanaan sampai pelaporan belum dapat terwujud karena permasalahan teknis dalam *software* aplikasi.
4. Konsep SAKIP belum dipahami sebagai sebuah konsep manajemen yang membantu unit kerja dalam mempermudah pencapaian tujuan. Konsep SAKIP baru dijalankan sebagai sebuah syarat administrasi.
5. Kualitas evaluator tidak sama, sehingga dalam melakukan evaluasi terdapat perbedaan hasil antar evaluator karena belum adanya satu pihak yang melakukan *Quality Assurance* atas hasil evaluasi dari evaluator.
6. Kurangnya komitmen Perangkat Daerah untuk menyajikan laporan kinerja secara komprehensif dan berbasis bukti dukung. Kemampuan menyajikan laporan kinerja berbeda-beda antar perangkat daerah, sehingga beberapa

perangkat daerah hanya sekedar melaporkan kinerja seadanya, tanpa berusaha mengungkap lebih jauh mengenai usaha-usaha yang telah dilaksanakan, faktor pendorong dan penghambat yang ditemui serta permasalahan dan solusi selama kurun waktu pencapaian kinerja.

7. Lemahnya pengendalian, sehingga kesulitan mengidentifikasi atau menginventarisasi permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran, atau bahkan tidak mengetahui standar yang seharusnya dicapai, sehingga terkesan tidak punya masalah.

5. Bagian Hukum

1. Dalam pelaksanaan kegiatan legislasi peraturan perundang-undangan untuk mengefektifkan waktu Ketika ada koreksi terkait penyusunan rancangan produk hukum dikoreksi dan di print dibagian hukum sehingga kebutuhan akan ATK kertas dan tinta printer menjadi meningkat.
2. Kurangnya SDM yang menguasai penyusunan produk hukum sehingga rancangan produk hukum menumpuk dibagian Perundang-undangan.
3. Layanan Internet yang kurang optimal sehingga laporan yang dikirim tidak bisa tepat waktu.

6. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas seperti alat-alat studio (kamera, handycam dan kelengkapannya), dan perangkat untuk editing video
2. Kurangnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sehingga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas
3. Kurangnya kuantitas sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas protokol dan peliputan
4. Belum optimalnya penjadwalan kegiatan pimpinan daerah sehingga berpengaruh pada belum optimalnya layanan bagi protokol dan komunikasi pimpinan daerah.

7. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

1. Kurangnya pemahaman pelaku pengadaan terhadap pengadaan barang jasa.
2. Regulasi dan Kebijakan terkait Pengadaan Barang Jasa dari pemerintah pusat yang sangat dinamis, membutuhkan waktu untuk sosialisasi kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.

3. Belum optimalnya Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Pada tingkat teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia pada bagian/unit kerja masih kurang.
2. Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja dan peralatan yang digunakan belum dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Klungkung Nomer 70 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah berpengaruh terhadap proses pelimpahan dan penyesuaian pelaksanaan tugas sehingga masih terdapat tumpang tindih pelaksanaan tugas dan tanggungjawab diantara bagian di Setda Kabupaten Klungkung.

Faktor- faktor tantangan dan peluang yang muncul dari luar dan dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja tahun 2024.

Tantangan pelayanan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung antara lain :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen kinerja, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta peningkatan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme

aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal.

Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik. Sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan yang ramping struktur dan kaya fungsi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Berdasarkan tantangan yang dihadapi, peluang pengembangan layanan di semua unit kerja sebagai berikut :

1. Pengembangan layanan kerjasama daerah yang berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan layanan kerjasama daerah.
Pengembangan layanan publikasi dan dokumentasi hukum berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk hukum daerah.
2. Pengembangan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbasis elektronik untuk lebih meningkatkan kualitas barang/jasa yang dihasilkan.
Pengembangan layanan pengendalian kebijakan pembangunan daerah untuk menjamin kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun sesuai dengan aspirasi masyarakat serta tepat guna bagi masyarakat.
Pengembangan layanan penerimaan tamu daerah yang mendukung promosi produk unggulan maupun program pembangunan daerah.
3. Reformasi Birokrasi yang tengah dilaksanakan menjadi salah satu strategi yang dapat mendukung percepatan pencapaian target-target pembangunan daerah di seluruh unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung termasuk dalam salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Klungkung yaitu Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kab. Klungkung dilaksanakan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Klungkung sebagaimana Tabel 2.4.

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	SEKRETARIAT DAERAH				47,733,208,542.00					49,950,812,012.00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Klungkung	Hasi evaluasi AKIP	70,02	47,284,935,542.00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Klungkung	Indeks Reformasi Birokrasi Setda	97,20 Poin	47,170,601,309.00	
	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	90 persen	27,308,500.00	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,57 Poin	29,987,600.00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	18,462,950.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	21,647,000.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31 Laporan	8,845,550.00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31 Laporan	8,340,600.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	Persentase Laporan Keuangan Terkirim Tepat Waktu	90 Persen	27,978,409,504.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu	100 Persen	28,575,371,430.00	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klungkung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang	27,945,521,504.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klungkung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang	28,542,573,930.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	32,888,000.00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	32,797,500.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	Presentase Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 persen	302,698,286.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	IP ASN Perangkat Daerah	77,43 Persen	113,719,540.00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	302,698,286.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	113,719,540.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	Persentase Pemenuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 persen	8,125,413,066.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	79,08 Persen	7,418,752,907.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klungkung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3,741,694,816.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Klungkung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3,553,504,007.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Klungkung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	18,750,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Klungkung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13,756,800.00	

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	953,122,500.00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	901,849,500.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	3,391,445,000.00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	2,929,242,000.00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	20,400,750.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	20,400,600.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Klungkung	Persentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dari Pengadaan Baru	100 persen	3,286,548,724.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Klungkung	Persentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dari Pengadaan Baru	100 persen	2,307,959,528.00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klungkung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3,286,548,724.00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Klungkung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2,307,959,528.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klungkung	Persentase Kendaraan Dinas dan Jabatan	100 persen	907,384,344.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Klungkung	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	100 persen	785,912,136.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Klungkung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	907,384,344.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Klungkung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	785,912,136.00	

	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klungkung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan KDH dan WKDH	100 persen	2,319,155,292.00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klungkung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan KDH dan WKDH	100 persen	2,616,938,068.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1,519,431,292.00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	1,892,238,068.00	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	16 Paket	108,724,000.00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	16 Paket	33,700,000.00	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	16,000,000.00	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	16,000,000.00	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	675,000,000.00	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	675,000,000.00	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Klungkung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 persen	839,867,050.00	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Klungkung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 persen	839,865,000.00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	479,999,150.00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	479,998,200.00	

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	359,867,900.00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	359,866,800.00	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Klungkung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah	100 Persen	3,165,475,176.00	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Klungkung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah	100 Persen	4,099,421,700.00	
	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	491,750,188.00	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	453,372,000.00	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	2,650,578,188.00	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	3,622,917,000.00	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	23,146,800.00	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	23,132,700.00	
	Penataan Organisasi	Kab. Klungkung	Persentase pemenuhan dokumen evaluasi SAKIP	100%	332,675,600.00	Penataan Organisasi	Kab. Klungkung	Persentase Rencana Aksi RB Terealisasi	95 Persen	382,673,400.00	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Klungkung	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	4 dokumen	332,675,600.00	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 dokumen	382,673,400.00	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Klungkung	Indeks Kualitas Kebijakan	100%	2,692,203,062.00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Klungkung	Indeks Kualitas Kebijakan	100%	2,319,937,703.00	
			Persentase Capaian IKU Bidang Pemerintahan dan kesra	100%				Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%		
	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Klungkung	Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan	100%	93,619,500.00	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Klungkung	Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan	100 Persen	303,417,000.00	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	100%	114.674.980,00	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	235,424,300.00	

	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 Desa/Kelurahan	5,026,100.00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	5,270,600.00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Laporan	88,593,400.00	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	62,722,100.00	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Klungkung	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	1,683,345,916.00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Klungkung	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 Persen	1,225,523,500.00	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Klungkung	Jumlah kebijakan bina mental spiritual	1 Kebijakan	1,658,644,212.00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Klungkung	Jumlah Kebijakan Bina Mental Spiritual	1 Kebijakan	1,224,155,000.00	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	22,578,004.00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	1,368,500.00	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1 Dokumen	2,123,700.00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	0 Dokumen	0.00	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Klungkung	Terpenuhinya Kebutuhan Kerja Sama Daerah	100%	23,248,730.00	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Klungkung	Terpenuhinya Kebutuhan Kerja Sama Daerah	100 Persen	22,957,500.00	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	22,683,350.00	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	22,617,000.00	
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	1 Dokumen	359,790.00	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	1 Dokumen	340,500.00	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Klungkung	Laporan pelaksanaan Evaluasi Kerja Sama	1 Laporan	205,590.00	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Klungkung	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kerja Sama	0 Laporan	0.00	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Klungkung	Persentase Desa Sadar Hukum	91	891,988,916.00	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Klungkung	Indek Reformasi Hukum Meningkat	97,50 Index	768,039,703.00	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Klungkung	Optimalnya Penyusunan Produk Hukum Daerah (Persen)	250 Produk Hukum	360,964,948.00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Klungkung	Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan Tepat Waktu	250 Produk Hukum	288,054,223.00	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Klungkung	Persentase desa sadar hukum yang dievaluasi	90 %	404,908,984.00	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Klungkung	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	1	404,310,312.00	

	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan informasi Hukum	Kab. Klungkung	Jumlah Produk hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasikan	250 Produk Hukum	126,114,984.00	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Klungkung	Jumlah Produk Hukum Terpublikasikan ke JDH	250 Produk Hukum	75,675,168.00	
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab Klungkung	Persentase capaian program prioritas bupati	100%	448,273,000.00	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Kab. Klungkung	Persentase Capaian Program Prioritas Bupati	100%	460,273,000.00	
		Kab Klungkung	Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Klungkung (Indeks)	91 indeks				Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Klungkung	91 Indeks		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab Klungkung	Level Kematangan UKPBJ (Level)	4 Level	240,839,000.00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Klungkung	Tingkat Kematangan UKPBJ	4 Level	252,839,000.00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	12 Dokumen	143,330,900.00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	143,349,100.00	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	12 Dokumen	35,678,100.00	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	12 Dokumen	54,316,300.00	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab Klungkung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	120 Orang	61,830,000.00	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Klungkung	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	120 Orang	55,173,600.00	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Klungkung	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian	100%	91,365,400.00	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Klungkung	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	100%	91,365,400.00	
	Koordinasi Sinkronisasi Monitoirng dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	24,398,500.00	Koordinasi Sinkronisasi Monitoirng dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6 Dokumen	24,398,500.00	
	Pengendalian dan Dirtribusi Perekonomian	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	38,366,700.00	Pengendalian dan Dirtribusi Perekonomian	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	38,366,700.00	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikco kecil	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	28,600,200.00	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikco kecil	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	28,600,200.00	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Klungkung	Persentase terlaksananya program prioritas bupati	100%	86,224,700.00	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Klungkung	Persentase Terlaksananya Program Prioritas Bupati	100 Persen	86,224,700.00	
	Fasilitasi Penyusunan Program	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokuman	28,571,800.00	Fasilitasi Penyusunan Program	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokuman	28,571,800.00	

	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	28,761,900.00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan	28,761,900.00	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	28,891,000.00	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Klungkung	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12 Laporan	28,891,000.00	
	Pemantauan Kebijakan Sumber daya Alam	Kab. Klungkung	Persentase Terlaksananya Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam	100%	29,843,900.00	Pemantauan Kebijakan Sumber daya Alam	Kab. Klungkung	Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	100 Persen	29,843,900.00	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	6 Dokumen	29,843,900.00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Klungkung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	6 Dokumen	29,843,900.00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat peranan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, Sekretariat Daerah tidak langsung menjalankan program dan kegiatan masyarakat. Peranan Sekretariat Daerah adalah mengoordinasikan usulan-usulan masyarakat yang masuk ke Sekretariat Daerah kepada instansi teknis yang menangani.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 yang mengusung tema “Memperkuat fondasi ekonomi Klungkung Maju, Berkelanjutan dan Sejahtera” yang diimplementasikan dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry, dan jasa produktif.
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Salah satu program prioritas terkait tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah prioritas Reformasi Birokrasi yang akan mulai digarap sebagai upaya dukungan terhadap pencapaian program nasional. Selain pelaksanaan reformasi birokrasi, Sekretariat Daerah Kab. Klungkung juga akan meningkatkan peran pada kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik. Tabel 3.1 menyajikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kab. Klungkung.

Dalam upaya mendukung peran Kabupaten Klungkung dalam membangun Daerah yang selaras dengan arah prioritas pembangunan nasional, Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mendukung melalui:

1. Prioritas Pangan dan Prioritas Perdagangan (Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ketahanan pangan di Kabupaten Klungkung, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung turut mendukung melalui kebijakan stabilitasi harga bahan pangan, dimana Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung melakukan monitoring terhadap harga bahan pokok dan selanjutnya jika ditemukan harga bahan pangan diatas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan, dilakukan upaya berupa pelaksanaan pasar murah di titik-titik yang berpotensi menjadi suatu titik rawan peningkatan harga bahan pangan pokok.

2. Prioritas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang pengembangan UMKM dan Lembaga Ekonomi Mikro lainnya Bagian Perekonomian membentuk Tim Monev KUR dan Tim Monitoring Penyertaan Modal Daerah. Tugas-tugas yang

dilaksanakan adalah melakukan monitoring dan evaluasi sejauhmana kebijakan pemerintah mampu berkinerja sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Prioritas Pengelolaan Pengawasan Perkotaan

Dalam rangka mendukung program nasional pengelolaan pengawasan perkotaan, Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di Kabupaten/Kota yang disinergikan dalam pelaksanaan Inspeksi Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Klungkung Bersama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Hal ini merupakan suatu dukungan dalam bidang pengawasan perkotaan.

4. Prioritas Otonomi Daerah dan Desentralisasi

a. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam rangka mendukung prioritas otonomi daerah dan desentralisasi, Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung mendukung melalui pembentukan produk hokum daerah yang responsive, akomodatif dan akuntabel. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kab. Klungkung adalah menurunkan tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan serta meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan instansi pemerintah.

b. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah

Peningkatan efektivitas tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan suatu tantangan bagi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, dimana focus penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Operasional Prosedur, Sistem Kerja, Budaya Kerja dan Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah belum terselenggara secara maksimal. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, focus evaluasi organisasi perangkat daerah ini juga diarahkan untuk menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal instansi pemerintah serta meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Kedua hal tersebut juga merupakan suatu pengungkit dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

c. Penyusunan dan Evaluasi Mandiri Terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta penyusunan publikasi ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kab. Klungkung. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2025-2029, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana deskripsi pada Tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1
Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TAHUN 2026	CARA PERHITUNGAN
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indek Reformasi Birokrasi	91.40	Penilaian dari Kementrian PAN RB
	Indeks Reformasi Birokrasi Setda	97.20	Penilaian dari Kementrian PAN RB
	Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Klungkung	91	Penilaian dari LKPP RI
	Persentase Capaian Program Prioritas Bupati	100	Jumlah Program Prirotas Tercapai dibagi Jumlah Total Program Prioritas dikali 100%
	Indeks Kualitas Kebijakan	100	Penilaian dari LAN
	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan	100	Jumlah Kegiatan dibagi Jumlah Kinerja dikali 100%

Sumber : RPJMD 2025-2029

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dalam sasaran strategis Sekretariat Daerah Kab. Klungkung telah ditetapkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.2.

Tabel 3.2.2
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kab. Klungkung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					PROGRAM PENDUKUNG
			2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan		Indek Reformasi Birokrasi	89.70	91.40	93.00	94.50	95.80	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan setda	Indeks Reformasi Birokrasi Setda	97.20	97.22	91.25	97.30	97.35	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Klungkung	90	91	91	91	92	Program Perekonomian dan Pembangunan
		Persentase Capaian Program Prioritas Bupati	N/A	100	100	100	100	
	Meningkatnya koordinasi bidang Hukum dan Pemerintahan	Indeks Kualitas Kebijakan	100	100	100	100	100	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan	100	100	100	100	100	

Sumber : RPJMD 2025-2029

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program OPD. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh OPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh OPD. Adapun strategi dan arah kebijakan tahun 2026 yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung, dapat dilihat pada table 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Sekretariat Daerah	Meningkatnya Percepatan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya komitmen percepatan reformasi birokrasi
			Efektifnya kelembagaan
			Diperbaikinya tata laksana
			Meningkatnya kepatuhan terhadap standar pelayanan public
			Meningkatnya kecepatan respon pengaduan Masyarakat
		Optimalnya Pelayanan Kesekretariatan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran
			Meningkatnya kinerja perangkat daerah
			Meningkatnya disiplin administrasi pegawai di perangkat daerah
			Meningkatnya kualitas layanan rapat
			Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana
			Terpenuhinya layanan pimpinan daerah
			Terkelolanya arsip perangkat daerah
		Optimalnya Pelayanan Kehumasan dan	Meningkatnya layanan keprotokolan pemerintah dan tamu

		Keprotokolan Pemerintah Daerah	daerah
			Optimalnya publikasi informasi kegiatan pemerintah
	Meningkatnya Kinerja Bidang Pereknonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas PBJ	Optimalnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
			Optimalnya pemanfaatan system pengadaan
			Optimalnya pembinaan dan advokasi PBJ
		Tercapainya Program Prioritas Pembangunan Daerah	Terakomodasinya program prioritas dalam perencanaan dan penganggaran
			Optimalnya pengendalian pembangunan daerah
			Optimalnya evaluasi dan pelaporan Pembangunan daerah
		Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian	Terkendalinya inflasi daerah
			Optimalnya akses keuangan daerah
			Optimalnya pemasaran produk UMKM
			Meningkatnya kinerja BUMD
			Optimalnya pemanfaatan sumber daya air tanah
	Meningkatnya Kinerja Bidang Hukum dan Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Hukum	Optimalnya pembentukan produk hukum daerah
			Terpublikasinya produk hukum daerah
			Terevaluasinya produk hukum daerah
			Terbinanya kesadaran hukum masyarakat di desa
			Terfasilitasinya bantuan hukum bagi masyarakat/OPD yang memerlukan
		Optimalnya Pelaksanaan Penyelenggaraan	Tertibnya administrasi pemerintahan
			Terfasilitasinya kerja

		pemerintah Daerah	sama daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik
			Terpenuhinya standar pelayanan minimal
		Meningkatnya Upaya Kesejahteraan Masyarakat	Optimalnya bina mental spiritual masyarakat
			Tertibnya administrasi hibah kepada masyarakat

Sumber : *Restra Setda 2025-2029*

4.2 Program dan Kegiatan

Pemetaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Program dan Kegiatan Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020.

Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mulai diberlakukan pada penyusunan perencanaan tahun 2026. Oleh karena itu perlu dilakukan pemetaan terhadap program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra Baperlitbang. Hasil pemetaan program dan kegiatan dalam Renstra Baperlitbang berdasarkan Program dan Kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang Profesional, responsif, transparan, santun dan inovatif dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung pada Renja TA 2026 merancang pelaksanaan 3 program, 18 kegiatan dan 44 sub kegiatan yang meliputi satu bidang urusan yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah yaitu Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Untuk mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka direncanakan program dan kegiatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana Tabel 4.2.

Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Tahun 2026 Dan Perkiraan Maju Tahun 2027

Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
4	1				SEKRETARIAT DAERAH				50,004,911,912.00		55,079,004,220.00
4	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Setda	Kab. Klungkung	97,20 Poin	47,224,701,209.00	97,25 Poin	50,809,141,531.00
4	1	01	02	01	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	76,57 Poin	29,987,600.00	76,61 Poin	29,987,600.00
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	8 Dokumen	21,647,000.00	8 Dokumen	21,647,000.00
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	31 Laporan	8,340,600.00	31 Laporan	8,340,600.00

4	1	01	02	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan dan Aset Tersusun Tepat Waktu	Kab. Klungkung	100 Persen	28,575,371,430.00	100 Persen	28,575,461,930.00
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Klungkung	127 Orang	28,542,573,930.00	127 Orang	28,542,573,930.00
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Klungkung	14 Laporan	32,797,500.00	14 Laporan	32,888,000.00
4	1	01	02	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	77,43 Persen	113,719,540.00	77,44 Persen	506,825,846.00
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Klungkung	60 Dokumen	113,719,540.00	60 Dokumen	506,825,846.00
4	1	01	02	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	Kab. Klungkung	79,08 Persen	7,472,852,807.00	79,09 Persen	7,472,852,807.00
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Klungkung	12 Paket	3,607,603,907.00	12 Paket	3,607,603,907.00

					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Klungkung	1 Paket	13,756,800.00	1 Paket	18,750,000.00
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Klungkung	12 Laporan	901,849,500.00	12 Laporan	959,312,500.00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Klungkung	24 Laporan	2,929,242,000.00	24 Laporan	3,391,445,000.00
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Klungkung	2 Dokumen	20,400,600.00	2 Dokumen	20,400,750.00
4	1	01	02	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dari Pengadaan Baru	Kab. Klungkung	100 persen	2,307,959,528.00	100 persen	4,603,748,724.00
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Klungkung	3 Unit	2,307,959,528.00	3 Unit	4,603,748,724.00
4	1	01	02	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang Dipelihara Dalam Kondisi Baik	Kab. Klungkung	100 persen	785,912,136.00	100 persen	907,384,344.00

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Klungkung	5 Unit	785,912,136.00	5 Unit	907,384,344.00
4	1	01	02	11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Keuangan KDH dan WKDH	Kab. Klungkung	100 persen	2,616,938,068.00	100 persen	2,319,155,292.00
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klungkung	2 Orang/Bulan	1,892,238,068.00	2 Orang/Bulan	1,519,431,292.00
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Klungkung	16 Paket	33,700,000.00	16 Paket	108,724,000.00
					Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klungkung	2 Orang	16,000,000.00	2 Orang	16,000,000.00
					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Oprasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Klungkung	2 Orang/Bulan	675,000,000.00	2 Orang/Bulan	675,000,000.00
4	1	01	02	12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kab. Klungkung	100 persen	839,865,000.00	100 persen	839,867,050.00

					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Klungkung	12 Paket	479,998,200.00	12 Paket	479,999,150.00
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Klungkung	12 Paket	359,866,800.00	12 Paket	359,867,900.00
4	1	01	02	13	Penataan Organisasi	Persentase Rencana Aksi RB Terealisasi	Kab. Klungkung	95 Persen	382,673,400.00	96 Persen	398,725,680.00
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Klungkung	4 dokumen	382,673,400.00	4 dokumen	398,725,680.00
4	1	01	02	14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Layanan Pimpinan Daerah	Kab. Klungkung	100 Persen	4,099,421,700.00	100 Persen	4,654,277,800.00
					Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Klungkung	12 Laporan	453,372,000.00	12 Laporan	586,807,000.00
					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Klungkung	12 Laporan	3,622,917,000.00	12 Laporan	4,001,260,000.00
					Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Klungkung	12 Laporan	23,132,700.00	12 Laporan	66,210,800.00
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kualitas Kebijakan	Kab. Klungkung	100%	2,319,937,703.00	100%	3,095,212,909.00
						Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan		100%		100%	

4	01	02	2	01	Administrasi Tata Pemerintahan	Terpenuhinya Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Klungkung	100 Persen	303,417,000.00	100 Persen	208,122,480.00
					Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Klungkung	2 Dokumen	235,424,300.00	2 Dokumen	115,302,980.00
					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Klungkung	1 Dokumen	5,270,600.00	1 Dokumen	5,026,100.00
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Klungkung	2 Dokumen	62,722,100.00	2 Dokumen	87,793,400.00
4	01	02	2	02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Klungkung	100 Persen	1,225,523,500.00	100 Persen	1,855,019,111.00
					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kebijakan Bina Mental Spiritual	Kab. Klungkung	1 Kebijakan	1,224,155,000.00	1 Kebijakan	1,830,317,851.00
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Klungkung	1 Dokumen	1,368,500.00	1 Dokumen	22,577,560.00
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Klungkung	0 Dokumen	0.00	1 Dokumen	2,123,700.00
4	01	02	2	04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kerja Sama Daerah	Kab. Klungkung	100 Persen	22,957,500.00	100 Persen	23,231,390.00
					Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Klungkung	12 Dokumen	22,617,000.00	12 Dokumen	22,683,210.00
					Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri	Kab. Klungkung	1 Dokumen	340,500.00	1 Dokumen	348,700.00
					Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan Pelaksanaan Evaluasi Kerja Sama	Kab. Klungkung	0 Laporan	0.00	1 Laporan	199,480.00
4	01	02	2	03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indek Reformasi Hukum Meningkat	Kab. Klungkung	97,50 Index	768,039,703.00	98,00 Index	1,008,839,928.00
					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan Tepat Waktu	Kab. Klungkung	250 Produk Hukum	288,054,223.00	250 Produk Hukum	528,225,960.00

					Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Klungkung	1 Kasus	404,310,312.00	1 Kasus	404,908,984.00
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum Terpublikasikan ke JDH	Kab. Klungkung	250 Produk Hukum	75,675,168.00	250 Produk Hukum	75,704,984.00
4	1	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian program prioritas bupati	Kab. Klungkung	100%	460,273,000.00	100%	1,174,649,780.00
						Indeks Tata Kelola Pengadaan Kabupaten Klungkung (Indeks)	Kab. Klungkung	91 (Indeks)		91 (Indeks)	
4	1	3	2	03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ	Kab. Klungkung	4 Level	252,839,000.00	4 Level	402,839,000.00
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Klungkung	12 Dokumen	143,349,100.00	12 Dokumen	193,330,900.00
					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	Kab. Klungkung	12 Dokumen	54,316,300.00	12 Dokumen	97,678,100.00
					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	Kab. Klungkung	120 Orang	55,173,600.00	130 Orang	111,830,000.00
4	1	03	2	01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian	Kab. Klungkung	100 Persen	91,365,400.00	100 Persen	241,432,180.00
					Koordinasi Sinkronisasi Monitoirng dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Klungkung	6 Dokumen	24,398,500.00	6 Dokumen	98,715,970.00
					Pengendalian dan Dirtribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Klungkung	4 Laporan	38,366,700.00	4 Laporan	91,380,250.00
					Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikco kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Klungkung	4 Dokumen	28,600,200.00	4 Dokumen	51,335,960.00
4	1	03	2	02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Terlaksananya Program Prioritas Bupati	Kab. Klungkung	100 Persen	86,224,700.00	100 Persen	334,289,800.00
					Fasilitasi Penyusunan Program	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab. Klungkung	2 Dokuman	28,571,800.00	2 Dokuman	178,868,800.00

					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Klungkung	12 Laporan	28,761,900.00	12 Laporan	74,892,200.00
					Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kab. Klungkung	12 Laporan	28,891,000.00	12 Laporan	80,528,800.00
4	1	03	2	04	Pemantauan Kebijakan Sumber daya Alam	Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Klungkung	100 Persen	29,843,900.00	100 Persen	196,088,800.00
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab. Klungkung	6 Dokumen	29,843,900.00	6 Dokumen	196,088,800.00

Sumber : SIPDSIPD RI 2026

Dari tabel 4.2 tersebut terlihat bahwa rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan disusun pada pagu indikatif rancangan akhir renja sudah sesuai dengan rancangan awal renja Sekretariat, namun terdapat perbedaan dalam jumlah pagunya mengikuti penyesuaian pagu APBD pada RKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2026.

BAB V

PENUTUP

Lebih dari sekedar memenuhi amanah Peraturan Perundang-Undangan, dokumen ini disusun dengan menaruh harapan besar agar Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung memiliki dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi, tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2026. Rencana Kerja merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis.

Untuk itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kab. Klungkung, meskipun perlu disampaikan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masih bersifat indikatif, dimana dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan pembiayaan/anggaran ataupun kemampuan anggaran daerah yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kerja ini tentu masih memerlukan penyempurnaan dimasa mendatang, oleh karenanya saran dan kritik yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan dokumen renja dimasa mendatang. Lebih lanjut, kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Pada Tahun 2026.

BUPATI KLUNGKUNG,



I MADE SATRIA